



RENCANA STRATEGIS 2025–2029



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2025.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra memuat perumusan indikator kinerja yang terukur guna akselerasi pencapaian kinerja Gubernur sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih memudahkan untuk dievaluasi capaiannya secara periodik, sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Rencana Strategis Dispora Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dispora guna mencapai tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Dipora dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Jambi



MUWRIADI, AP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19741107 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
BAB IPENDAHULUAN	7
1.	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
2.	15
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	17
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	39
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	39
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.2.2. Isu Strategis.....	41
BAB IIITUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.	59
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	60
3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	65
BAB IVPROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
4.	67
4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	67
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	84

BAB VPENUTUP.....	86
5.	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	15
Tabel 2 Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun 2024 di Provinsi Jambi	16
Tabel 3 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, dan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 4 Sarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga	31
Tabel 5 Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga	32
Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	33
Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	35
Tabel 8 Permasalahan Masing-Masing Urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	40
Tabel 9 IPP dan Peringkat Provinsi.....	42
Tabel 10 Perolehan Medali PON XVI 2004 Palembang 02 s.d 14 September 2004	48
Tabel 11 Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut 09 s.d 20 September 2024	49
Tabel 12 Perolehan Medali POPNAS XV 2019 Jakarta 16 s.d 24 November 2019.....	51
Tabel 13 Perolehan Medali Provinsi Jambi pada PEPARPENAS	54
Tabel 14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	58
Tabel 16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029	60
Tabel 17 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	62
Tabel 18 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar di Event Nasional.....	63
Tabel 19 Penahapan Renstra PD	64
Tabel 20 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	65
Tabel 21 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	66
Tabel 22 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD.....	72
Tabel 23 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Jambi	77

Tabel 24 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
Tabel 25 Indikator Kinerja Utama.....	84
Tabel 26 Indikator Kinerja Kunci	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan daerah memerlukan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang secara optimal. Hal ini dilakukan untuk menampung seluruh aspirasi secara partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun secara terpadu serta menyeluruh tentunya menentukan pencapaian hasil yang optimal di masa mendatang.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD yang selama ini telah dan akan dijalankan diuraikan menjadi Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai rencana Strategis bagi tiap Organisasi Perangkat Daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah (PD).

Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen formal dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan sebagai acuan guna penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan Pembangunan daerah pada umumnya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), serta dalam menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD kedalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) harus mampu menjawab 3 pertanyaan dasar, yakni:

- a. Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang;
- b. Bagaimana mencapainya dan;
- c. Langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder guna mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknologis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang menjadi urusan kewenangan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD).

Dilain pihak, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 2025-2029 ini berfungsi sebagai dokumen pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. Namun tentu saja nilai manfaat Renstra ini sangat ditentukan oleh partisipasi aktif Aparatur Sipil Negara dan seluruh stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peratuhan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jambi;

21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dispora Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dan acuan dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga Provinsi Jambi tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Dokumen Resntra Dispora Provinsi Jambi juga merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan tujuan:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga.
- b. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
- c. Sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dan seluruh stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, berkualitas dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra PD ahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengumumkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rentsra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengumumkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rentsra Perangkat Daerah ini.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan (Tingkat capaian kinerja PD) 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga

tahun 2024, dan data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis secara deskriptif dan diagnostic.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD.

2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi PD, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, Rensra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berisi perumusan tujuan dan sasaran Renstra.

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Strategis Rentsra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan

program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rentsra PD.

3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

4. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan dan indikator kinerja, serta target, dan pendanaan indikatif.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja untuk mengukur penyelenggaraan bidang urusan.

5. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor nasional, wirausaha muda berprestasi, dan pemuda kader nasional. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat nasional. c. Kerja sama kepemudaan internasional.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
		e. Kerja sama keolahragaan internasional.		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat nasional. b. Kerja sama kepramukaan internasional.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dari pembagian urusan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagai landasan hukum berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435,92 Km². Berdasarkan data Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2025, jumlah penduduk Jambi pada tahun 2024 mencapai 3.724.280 juta jiwa. Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Provinsi Jambi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun 2024 di Provinsi Jambi

NO	KAB / KOTA	16-30		TOTAL
		(LK)	(PR)	
1	KERINCI	33.936	32.138	66.074
2	MERANGIN	53.567	51.972	105.539
3	SAROLANGUN	42.690	40.947	83.637
4	BATANGHARI	42.738	40.471	83.209
5	MUARO JAMBI	60.527	57.560	118.087
6	TANJUNG JABUNG BARAT	46.078	43.429	89.507
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	32.066	31.039	63.105
8	BUNGO	50.867	49.153	100.020
9	TEBO	50.391	48.151	98.542
10	KOTA JAMBI	84.786	82.306	167.092
11	KOTA SUNGAI PENUH	13.420	12.679	26.099
PROVINSI JAMBI		511.066	489.845	1.000.911

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi

Dari data diatas, Provinsi Jambi memiliki jumlah pemuda 1.000.911 jiwa terdiri dari 11 kabupaten/kota. Hal ini menjadi pemikiran Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga dengan keunggulan jumlah pemuda dapat meningkatkan peran aktif dalam pembangunan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara otomatis untuk mencapai tujuan keolahragaan dimana tujuan keolahrgaan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan dalam lingkup:

- a. Olahraga Prestasi
- b. Olahraga Pendidikan
- c. Olahraga Masyarakat

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, meliputi layanan kepemudaan, sarana prasarana dan kesejahteraan, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai tugasnya.

2. Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pemuda dan olahraga, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
- d. Pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan koordinasi dan melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja ASN;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi dan peningkatan sumber daya manusia ASN;
- c. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan;
- d. Melaksanakan analisis jabatan dan ASN;
- e. Menyusun instrument analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan penataan pengadministrasian barang dan jasa;
- g. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian;
- h. Mengelola urusan kerumahtanggaan dan menjaga ketertiban kebersihan dan keamanan serta keindahan kantor; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian keuangan dan aset

- a. Memberikan dukungan administrasi di bidang keuangan;
- b. Memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan urusan administrasi dan mengelola barang milik Daerah;
- d. Melaksanakan pemungutan, pembukuan dan penyetoran retribusi Daerah dan penyusunan laporan keuangan penerimaan retribusi Daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan Dinas; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Subbagian program dan pelaporan
- a. Menyusun rencana strategis Dinas;
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan Dinas;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis evaluasi dan pelaporan;
 - d. Menyusun dan mengolah data program kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - f. Menyusun laporan tengah tahunan, tahunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja serta laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pemberdayaan Pemuda

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas

- pemuda, peningkatan ilmu IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu IPTEK dn IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan SDP, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan SDP, peningkatan wawasan pemuda peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiridari:

1. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda

Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang SDP, IPTEK dan IMTAQ pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Peningkatan wawasan dan kapasitas Pemuda

Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Peningkatan kreativitas Pemuda

Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kreativitas pemuda;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan kreativitas pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kreativitas pemuda;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kreativitas pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengembangan Pemuda

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Pemuda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Pemuda Menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- c. Menyusun norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. Melaksanakan Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. Melaksanakan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Pemuda terdiri dari:

1. Seksi Kepemimpinan , Kepeloporan dan kemitraan Pemuda

Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kinerja di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi OrganisasiKepemudaan dan Kepramukaan

Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Infrastruktur dan kewirausahaan Pemuda

Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;

- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pembudayaan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan

- olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari:

1. Seksi Olahraga Pendidikan dan sentraolahraga

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi OlahragaRekreasi, tradisional dan layananankhusus

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan olahraga

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK dan

tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dibidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan IPTEK dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisai dan infrastruktur olahraga;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:

1. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas :

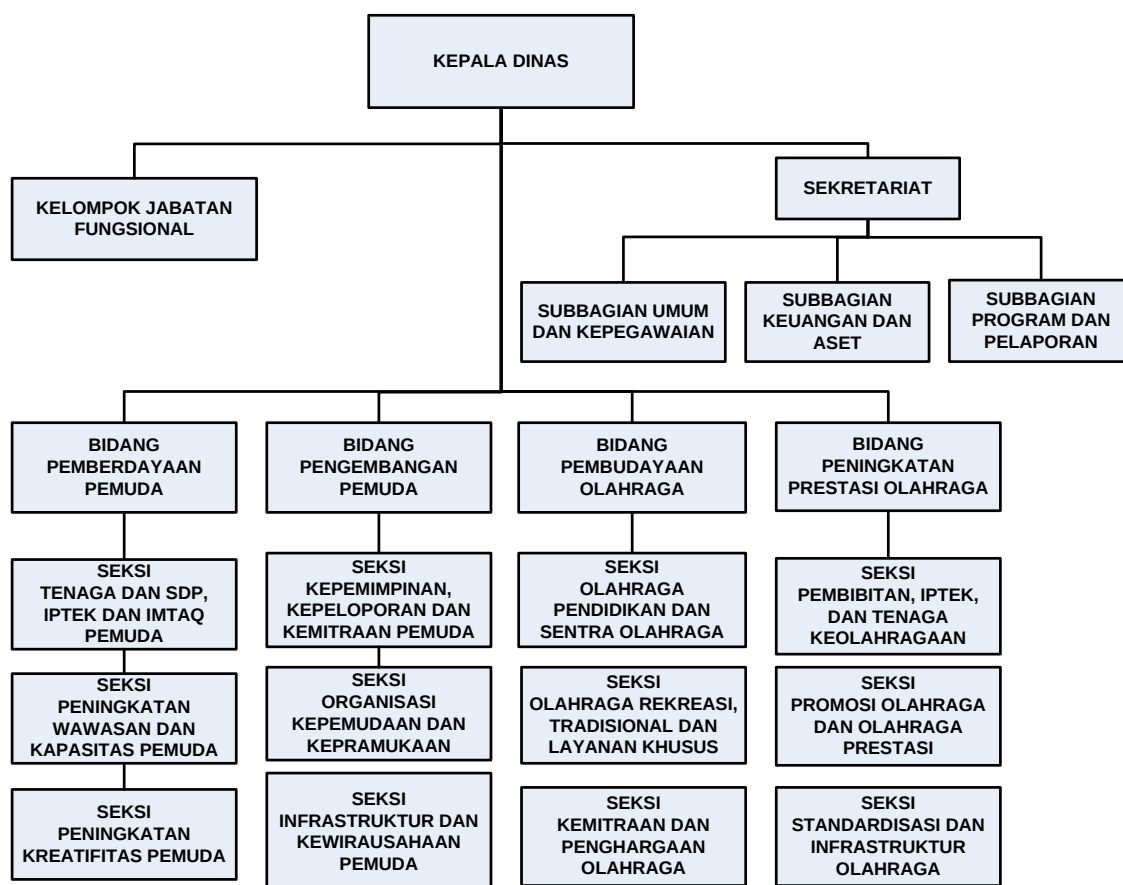
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Kelompok jabatan fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Sumber: Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Hingga tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi memiliki jumlah pegawai sebanyak 122 orang terdiri dari 85 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut adalah table pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan dan Tingkat pendidikan.

Tabel 3 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan, dan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Jenis kelamin		Golongan				Pendidikan						
	LK	PR	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2
ASN	55	30	-	27	54	4	-	1	35	-	1	38	10
PTT	25	12	-	-	-	-	2	-	23	1	1	10	-

Sumber: Subbag Umum &Kepegawaian Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Jambi

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tertera pada tabel berikut:

Tabel 4 Sarana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Jenis Aset	Jumlah
1	AC	28
2	Komputer Pc	47
3	Printer	46
4	UPS	20
5	Laptop	21
6	Internet Komputer Program	8
7	Tabung Pemadam Kebakaran	21
8	Meja Direktur	2
9	Kursi Asrama PPLP	22
10	Kursi Kerja Staff dan Rafat	36
11	Kursi Kadis	1
12	Lemari Pakaian PPLP	22
13	Peralatan Water Boom	1
14	Mesin Vacuum	2
15	Tiang Besi Umbul-Umbul	50
16	Meja Asrama PPLP	22
17	Lemari 4 Pintu	1
18	Meja Rapat	8
19	Tedmon si	3
20	Kursi Life Guard	2
21	Meja komputer	1
22	Meja Kerja staff	6
23	Dispenser	5
24	Penanggung Besi Stenlis 1	1
25	Kursi Kerja Putar 4	4
26	Mesin Penghancur Kertas	1
27	Mic Wiraless	2
28	Tiang Mic Berdiri	2
29	Tiang Mic Meja	4
30	Kamera	10
31	Sound System Pertebel wirales	3
32	Projektor LCD + Screen	2
33	DRONE	1
34	CCTV	8
35	Motor Dinas	31
36	Mobil Dinas	10
37	TV	10
Total		464

Tabel 5 Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Nama Bangunan	Luas	Tahun	Lokasi
1	Gedung Kantor Dispora Provinsi Jambi	1.200 m2	2005	Jl. Letkol Slamet Riyadi
2	Gedung GOR Gelora Kota Baru Jambi	3.932 m2	1986	Jl. H. Agus Salim
3	Gedung GOR Padepokan Yudo Kota Baru	600 m2	1987	Jl. H. Agus Salim
4	Gedung GOR Tennis Meja Kota Baru	400 m2	1987	Jl. H. Agus Salim
5	Gedung GOR Tinju (Pertina) Kota Baru	900 m2	2008	Jl. H. Agus Salim
6	Gedung GOR Persani	2.000 m2	1992	Jl. H. Agus Salim
7	Gedung Asrama PPLP Stadion Mini	1.170 m2	2007	Jl. Jend. A Thalib
8	Lapangan Tennis Kota Baru	1.500 m2	2007	Jl. H. Agus Salim
9	Gedung GOR Kolam Renang Prestasi	8.640 m2	2000	Jl. Kapten Sujono
10	Kolam Renang Telago Ratu Kota Baru	2.280 m2	2008	Jl. Kapten Sujono
11	Gedung GOR PABSI Jambi	400 m2	1980	Jl. Basuki Rahmat
12	Gedung GOR Persaudaraan Beladiri Kempo	320 m2	2003	Jl. H. Agus Salim
13	Gedung Cabor Gulat (PGSI) Jambi	260 m2	1992	Jl. Diponegoro
14	Gedung GOR Badminton (PBSI) Simpang Pulai	516 m2	1988	Jl. Prof Dr. M. Yamin

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas belum mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun							Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Indeks	-	-	-			B	BB (70,01)	BB (71)	BB (72)	A			B	B (67,05)	BB (70,25)			100	95,77	98,94
2	Nilai IKM	Indeks	-	-	-			80	80	82	86	86,3			82,36	83,47	85,56			103	104	104
3	Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda	%	-	-	-			0,033	0,041	0,052	0,063	0,074			0,029	0,088	0,092			88	215	177
4	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	%	-	-	-			0,13	0,15	0,17	0,19	0,21			0,127	0,137	0,155			98	91	91
5	Peringkat POPNAS	peringkat	-	-	-			9	8	8	7	7			10	15	15					
6	Peringkat PEPARPENAS	peringkat	-	-	-			12	11	11	10	10			13	20	20					
7	Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi	%	-	-	-			100	100	100	100	100			100	100	100			100	100	100

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang telah mencapai target hingga tahun 2025, antara lain Nilai IKM, Persentase peningkatan penumbuhan kewirausahaan pemuda, dan Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi. Faktor pendukung tercapainya hal ini adalah:

1. OPD makin menyadari pentingnya kualitas pelayanan sehingga nilai IKM ikut meningkat.
2. Tingginya minat pemuda terhadap kewirausahaan.
3. Dukungan pemerintah baik dari segi anggaran maupun kebijakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, indikator yang belum mencapai 100% antara lain Nilai SAKIP, Persentase peningkatan peran serta kepemudaan, Peringkat POPNAS, dan Peringkat PEPARPENAS. Faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain:

1. Belum maksimalnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
2. Pada event olahraga pelajar tingkat nasional seperti POPNAS dan PEPARPENAS, tidak adanya Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) berjalan sebelum pelaksanaan event sehingga atlet kurang persiapan dan kurang latihan.
3. Atlet POPNAS dan PEPARPENAS merupakan pemain baru dikarenakan para atlet lama sudah tamat sekolah. Proses rekrutmen atlet tertunda dikarenakan penyebaran wabah COVID-19
4. Masih lemahnya pembinaan olahraga pelajar di tingkat kabupaten/kota.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	Dinas Pemuda dan Olahraga			48.454.688.744	64.110.887.770	52.904.025.909	65.953.522.373			45.630.712.602	60.469.519.335	50.186.399.912	-			94,17	94,32	94,86		13,17	0,37
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.579.040.650	16.856.620.690	16.029.025.909	16.103.256.228			15.743.401.696	15.971.141.236	15.000.229.753	-			94,96	94,75	93,58		-0,92	-0,73
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			667.064.590	578.203.362	400.000.000	180.674.464			526.264.698	543.188.223	259.721.261	-			78,89	93,94	64,93		-32,99	-5,90
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			417.363.982	411.860.904	304.673.000	124.794.454			325.038.121,00	400.101.223	210.066.568				77,88	97,14	68,95		-28,79	-2,14
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			249.700.608	166.342.458	95.327.000	55.880.010			201.226.577,00	143.087.000	49.654.693				80,59	86,02	52,09		-39,15	-16,35
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.647.255.039	11.452.635.342	11.979.852.261	12.033.668.155			11.239.884.717	10.915.072.042	11.511.882.430	-			96,50	95,31	96,09		1,13	-0,21
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.438.030.239	11.274.250.542	11.856.732.261	11.887.563.355			11.030.671.018,00	10.747.993.268	11.390.122.430				96,44	95,33	96,06		1,33	-0,19
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			209.224.800	178.384.800	123.120.000	146.104.800			209.213.699,00	167.078.774	121.760.000				99,99	93,66	98,90		-9,02	-0,37
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	19.320.000	50.000.000	28.192.530			-	19.277.500	31.124.249	-			-	99,78	62,25		57,59	-37,61
3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-	19.320.000	50.000.000	28.192.530			-	19.277.500	31.124.249				-	99,78	62,25		57,59	-37,61
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	126.982.456	-	20.817.360			-	115.818.980	-	-			-	91,21	-		-83,61	-
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-	91.000.000	-	9.022.860			-	84.888.000	0				-	93,28	-		-90,08	-
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	35.982.456	-	11.794.500			-	30.930.980	0				-	85,96	-		-67,22	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			731.004.755	884.911.526	463.694.748	414.231.723			599.204.821	793.583.493	359.891.397	-			81,97	89,68	77,61		-12,40	-2,02
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.071.320	54.207.040	24.977.172	14.000.000			35.063.768,00	53.587.889	21.850.000				99,98	98,86	87,48		-14,44	-6,32
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136.176.156	134.979.452	131.832.000	52.000.000			136.134.677,00	125.719.007	120.518.090				99,97	93,14	91,42		-21,26	-4,34
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.140.000	81.985.000	22.796.000	39.585.000			24.945.650	21.062.600	22.716.000				99,23	25,69	99,65		75,86	106,88
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			83.577.000	116.988.114	104.751.576	56.054.600			75.510.952	101.267.894	82.090.700				90,35	86,56	78,37		-5,66	-6,83
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			5.384.112	6.751.920	-	2.600.000			5.352.500,00	3.744.000	-				99,41	55,45	-		-18,04	-44,22
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			445.656.167	490.000.000	179.338.000	249.992.122,5			322.197.274,00	488.202.103	112.716.607				72,30	99,63	62,85		-4,68	0,45
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			354.097.834	154.570.000	-	185.862.177			352.846.500	134.600.000	-	-			99,65	87,08	-		-18,05	-56,31
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	-	-	-			0,00	-	-				-	-	-		-	-
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			354.097.834	154.570.000	-	185.862.177			352.846.500,00	134.600.000	-				99,65	87,08	-		-18,05	-56,31

No	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada						Rata-Rata	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.959.100.200	2.665.658.884	2.797.228.900	2.577.827.525			1.834.525.727	2.549.684.082	2.553.917.351	-			93,64	95,65	91,30		11,05	-1,20
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			947.514.000	1.072.724.370	1.074.308.900	868.706.525			839.642.462,00	972.670.082	916.680.051				88,62	90,67	85,33		-1,93	-1,79
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.011.586.200	1.592.934.514	1.722.920.000	1.709.121.000			994.883.265,00	1.577.014.000	1.637.237.300				98,35	99,00	95,03		21,61	-1,68
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.220.518.232	974.339.120	338.250.000	661.982.294			1.190.675.233	899.916.916	283.693.065	-			97,55	92,36	83,87		3,42	-7,26
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			534.299.600	718.108.200	105.140.000	324.621.760			506.912.231,00	665.898.916	85.103.065				94,87	92,73	80,94		52,60	-7,49
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			81.953.032	109.005.920	97.110.000	50.556.000			81.428.600,00	87.168.000	72.590.000				99,36	79,97	74,75		-8,61	-13,02
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			604.265.600	147.225.000	136.000.000	286.804.534			602.334.402,00	146.850.000	126.000.000				99,68	99,75	92,65		9,21	-3,53
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			4158971058	2.788.996.464	775.000.000	391.548.160			3.994.142.346	2.702.942.591	680.317.770	-			96,04	96,91	87,78		-51,54	-4,25
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			3.796.020.808	2.339.379.220	700.000.000	335.159.350			3.665.263.863	2.269.254.492	627.197.170	-			96,56	97,00	89,60		-53,52	-3,58
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			417.040.664	217.638.000	-	-			381.811.086,00	216.612.991	-	-			91,55	99,53	-	-	-49,27	-45,64
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi*			-	-	163.942.880	72.753.120			-	-	157.433.166	-			-	-	96,03		-55,62	-
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			356.502.184	999.470.618	-	-			347.105.657,00	982.318.707	-	-			97,36	98,28	-	-	180,35	-49,53
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi*			-	-	75.000.000	12.922.700			-	-	60.045.900	-			-	-	80,06		-82,77	-
1.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			339.954.248	494.521.376	236.057.120	148.656.040			317.746.580,00	456.051.000	206.403.204				93,47	92,22	87,44		-14,61	-3,26
1.6	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			2.682.523.712	-	-	-			2.618.600.540,00	-	-	-			97,62	-	-	-	-	-
1.7	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi			-	298.572.431	-	-			-	291.121.195	-	-			-	97,50	-	-	-	-
1.8	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda*			-	-	75.000.000				-	-	73.135.400	-			-	-	97,51	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada						Rata-Rata	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1.9	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			0	329.176.795	-	-			-	323.150.599	-	-			-	98,17	-	-	-	-
1.10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi*			-	-	150.000.000	57.043.715			-	-	130.179.500				-	-	86,79	-	-61,97	-
1.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi*			-	-	-	43.783.775			-	-	-				-	-	-		-	-
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			362.950.250	449.617.244	75.000.000	56.388.810			328.878.483	433.688.099	53.120.600	-			90,61	96,46	70,83	0,00	-28,09	-10,06
2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			-	124.499.449	-	-			-	124.233.299		-			-	99,79	-	-	-	-
2.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda*			-	-	75.000.000	56.388.810			-	-	53.120.600	-			-	-	70,83		-24,81	-
2.3	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			362.950.250	325.117.795	-	-			328.878.483,00	309.454.800	-	-			90,61	95,18	-	-	-10,42	5,04
2.4	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi*			-	-	-				-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
III	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			25.016.677.036	41.726.628.651	33.375.000.000	45.620.354.931			23.193.168.560	39.056.794.033	31.780.852.389	-			92,71	93,60	95,22		27,82	1,35
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			5.737.853.827	10.578.275.432	2.105.000.000	2.157.511.800			5.657.594.354	9.430.833.422	1.985.848.000	-			98,60	89,15	94,34		2,25	-1,88
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi			5.737.853.827	10.578.275.432	-	-			5.657.594.354,00	9.430.833.422	-				98,60	89,15	-	-	84,36	-54,79

No	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada						Rata-Rata	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi*			-	-	2.105.000.000	2.157.511.800			-	-	1.985.848.000				-	-	94,34		2,49	-
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			16.737.221.127	25.784.591.918	26.650.000.000	39.633.125.946			15.166.465.079	24.912.326.902	26.430.320.454	-			90,62	96,62	99,18	0,00	35,38	4,64
2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			7.483.530.920	16.690.410.606	-	-			6.491.798.411,00	16.254.184.824					86,75	97,39	-		123,03	-43,87
2.2	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi*			-	-	19.614.853.040	14.037.714.749,5			-	-	19.449.384.494				-	-	99,16		-28,43	-
2.3	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			1.031.035.700	1.619.255.098	-	-			977.401.620	1.604.128.222					94,80	99,07	-		57,05	-47,75
2.4	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi*			-	-	4.060.000.000	3.599.970.724			-	-	4.042.087.560				-	-	99,56		-11,33	-
2.5	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			8.222.654.507	7.474.926.214	-	-			7.697.265.048,00	7.054.013.856					93,61	94,37	-		-9,09	-49,59
2.6	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga*			-	-	2.975.146.960	21.995.440.472			-	-	2.938.848.400				-	-	98,78		639,31	-
III	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			2.541.602.082	5.363.761.301	4.620.000.000	3.829.717.185			2.369.109.127	4.713.633.709	3.364.683.935	-			93,21	87,88	72,83	0,00	26,69	-11,42
3.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			2.541.602.082	5.084.167.464	-	-			2.369.109.127,00	4.437.432.069					93,21	87,28	-	-	100,04	-53,18
3.2	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*			-	-	4.530.000.000	3.796.950.375			-	-	3.349.633.535	-			-	-	73,94		-16,18	-
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			-	279.593.837	-	-			-	276.201.640					-	98,79	-	-	-	-
3.4	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi*			-	-	90.000.000	32.766.810			-	-	15.050.400				-	-	16,72		-63,59	-
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.700.000.000	2.738.641.965	2.725.000.000	3.838.363.055			2.700.000.000	2.738.641.475	2.725.000.000	-			100,00	100,00	100,00	0,00	13,93	0,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.700.000.000	2.738.641.965	2.725.000.000	3.838.363.055			2.700.000.000	2.738.641.475	2.725.000.000	-			100,00	100,00	100,00	0,00	13,93	0,00
1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			2.700.000.000	2.738.641.965	2.725.000.000	3.838.363.055			2.700.000.000,00	2.738.641.475	2.725.000.000				100,00	100,00	100,00	0,00	13,93	0,00

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi antara lain:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota
2. Instansi pemerintah terkait seperti Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosdukcapil, Kesbangpol, BPS, BNN.
3. Lembaga terkait seperti KONI, NPC, Kwarda Pramuka, dan KORMI
4. Organisasi Kepemudaan
5. Pemuda usia 16-30 tahun
6. Atlet olahraga

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2025 urusan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mempunyai tujuan yaitu “***meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga***”.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, pada Pasal 4 yang berbunyi “*Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Kebijakan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sangat penting sekali dilakukan karena akan memberikan dampak yang positif dalam membangun dunia kepemudaan dan olahraga itu sendiri. Namun dalam perjalanannya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi menghadapi beberapa kendala dan permasalahan serta isu strategis kepemudaan dan keolahragaan yang terjadi dan berdampak pada kondisi pembangunan pemuda dan capaian prestasi olahraga di Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisa permasalahan untuk

masing-masing urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, dapat diidentifikasi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 8 Permasalahan Masing-Masing Urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya Keterampilan dan Kemandirian Pemuda berbasis Entrepreneurship	KEPEMUDAAN	
	Kurangnya minat Pemuda terhadap Kewirausahaan	Kurangnya kegiatan pengembangan Potensi Pemuda yang memunculkan keunggulan Lokal dan Berdaya Saing
		Kurangnya fasilitas Wira Usaha Mandiri yang dapat dijangkau pemuda sebagai wadah pengembangan diri dalam berwirausaha
		Kurangnya Sosialisasi dan Informasi tentang pentingnya Kewirausahaan di kalangan Pemuda
Menurunnya peran serta masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga	KEOLAHRAGAAN	
	Kurangnya Penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam kejuaraan serta belum meratanya sarana prasaran dan Tenaga Keolahragaan di daerah	Kurangnya kejuaraan yang diselenggarakan dan diikuti oleh cabang olahraga
		Kurangnya sebaran Tenaga Keolahragaan yang bersertifikasi di Daerah
		Kurangnya penyebaran fasilitas sarana olahraga prestasi yang dimiliki yang mudah di akses oleh masyarakat
	Kurangnya Pembudayaan Olahraga di Kecamatan, Desa/ Kelurahan untuk meningkatkan Pola Hidup Sehat	Kurangnya sarana prasarana olahraga tradisional dan rekreasi di kecamatan, Desa/ Kelurahan
		Kurangnya Event olahraga kemasyarakatan di Kecamatan, Desa/ Kelurahan
		Kurangnya Event olahraga masyarakat dan pengembangan olahraga masyarakat pada usia didik
Belum Optimalnya Kegiatan Pramuka terhadap Generasi Muda	KEPRAMUKAAN	
	Menurunnya Minat Pemuda terhadap pendidikan Kepramukaan	kurangnya kegiatan yang menarik dan Menantang yang mengandung unsur pendidikan
	Belum Optimalnya Kerjasama Perangkat Daerah lain tentang kepramukaan	kurangnya pemahaman pelaksanaan Pendidikan Ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah

2.2.2. Isu Strategis

A. Isu Strategis Kepemudaan

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada Pasal 3 dinyatakan : pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah telah mencatatkan tintanya dalam setiap momen penting dalam perjalanan Bangsa ini bahwa kaum muda senantiasa berperan penting sebagai lokomotif penggeraknya. Peran serta Pemuda dalam perubahan sosial kultur Bangsa bukanlah sebagai isapan jempol adanya, jika perubahan penting ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan, maka pada semua tahapan peran pemuda selalu berperan dan turut andil sebagai katalisator perubahan tersebut. Oleh karena itulah pembangunan Kepemudaan memiliki arti penting bagi keberlangsungan Negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran serta pemuda dalam pembangunan sangat urgent sekali. Secara umum tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan salah satu alat ukur untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada 5 (lima) domain IPP yaitu *“Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi”*.

Kehadiran Indeks IPP dijadikan rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi, hal ini sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan. Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang *“Kordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan”*.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan : efektivitas pelayanan Kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan, serta kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Untuk lebih jelasnya perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi dapat di lihat berikut ini :

Tabel 9 IPP dan Peringkat Provinsi

No	Provinsi	Nilai IPP					Peringkat IPP				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	55,33	56,33	57,67	69,67	57,67	5	3	3	3	4
2	Sumatera Utara	54,17	54,5	52,5	52,5	53,33	7	8	16	22	17
3	Sumatera Barat	50,33	55,33	51,33	51	55,17	17	6	20	24	11
4	Sumatera Selatan	49,5	48,67	48,33	50,83	51,33	25	31	30	25	29
5	Riau	52,67	50,67	56,17	56,67	52,17	9	19	5	6	26
6	Kepulauan Riau	58,67	55,67	56,83	58,17	56,83	3	5	4	4	6
7	Jambi	49,33	50,33	54,5	53,5	51,83	28	23	9	15	27
8	Bengkulu	52,67	50,83	53,17	53,17	54,83	10	18	12	18	12
9	Lampung	48,5	49,83	47	48	53	33	26	33	33	19
10	Bangka Belitung	48,67	48,83	48,17	49,33	52,67	32	29	31	30	22
11	DKI Jakarta	54	51	49,67	52,67	51,5	8	16	24	21	28
12	Jawa Barat	50	48,83	47	48	49,67	20	27	34	34	33
13	Jawa Timur	52,5	53	53,5	56,33	55,5	12	10	11	8	10
14	Jawa Tengah	52,5	53	53,5	56,33	55,5	12	10	11	8	10
15	DI Yogyakarta	74,67	71	69,67	69,67	67,5	1	1	1	1	1
16	Banten	52,17	48,5	47,83	50,83	52,17	13	32	32	26	25
17	Bali	61,67	61	61,33	62	62,17	2	2	2	2	2
18	NTB	51,5	51	48,83	49,33	52,5	16	17	28	31	24
19	NTT	51,67	51	48,83	49,33	52,5	15	17	28	31	24
20	Kalimantan Barat	49,33	47,83	49	49,33	50,33	29	33	26	31	30
21	Kalimantan Tengah	49,17	50,67	49	49,5	50	31	21	27	29	32
22	Kalimantan Selatan	47,83	48,67	48,33	49	50,17	34	31	30	32	31
23	Kalimantan Timur	56,33	54,83	52,5	54	56,67	4	7	17	12	7
24	Kalimantan Utara	50,33	52,67	48,5	50	49,67	18	11	29	28	34
25	Sulawesi Barat	49,5	47,33	49,17	51	53,33	27	34	25	24	18
26	Sulawesi Tengah	50	52,17	54,17	53,5	53	21	13	10	16	21
27	Sulawesi Selatan	52	48,67	52,67	50,83	53,67	14	30	15	25	16
28	Sulawesi Utara	49,5	50,17	52,5	53	53,33	26	24	16	19	17
29	Sulawesi Tenggara	49,83	48,83	50,33	51,83	53	23	28	22	23	20
30	Gorontalo	49,33	50,67	53,17	54,17	53,83	30	20	13	11	14
31	Maluku	50	52	54,67	55,33	56,67	22	14	8	10	8
32	Maluku Utara	52,67	55,83	55,67	57,67	59,17	11	4	6	5	3
33	Papua Barat	50,17	51,33	55,17	56,67	55,83	19	15	7	7	9
34	Papua	49,83	50,17	52	55,5	57,5	24	25	19	9	5
35	Papua Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Papua Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : IPP Kemempora RI 2024

Melihat dari capaian Nilai dan Peringkat IPP Provinsi Jambi kurun waktu 5 tahun terakhir memang mengalami fluktuasi. Hal ini tentulah menjadi perhatian bagi kita semua, isu strategis serta permasalahan yang dihadapi membutuhkan perhatian serta penanganan khusus dari Pemerintah Daerah. Beberapa isu strategis dan permasalahan kepemudaan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya:

1. Kewirausahaan dan Peluang Kerja Pemuda

Kewirausahaan pada saat ini sering kali dipertimbangkan setelah kaum muda pada saat gagal untuk mendapatkan pekerjaan baik di bidang formal maupun informal. Hal ini dikarenakan kewirausahaan masih dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi resiko besar. Beberapa isu yang dihadapi oleh pengusaha muda dan wirausaha pemula antara lain kurangnya dukungan finansial dan kurangnya akses pelatihan. Oleh karena itu tingkat pengangguran masih dianggap sebagai indikator yang paling dapat dilihat jelas sebagai tantangan ketenagakerjaan pemuda.

Masalah serius dan berakar panjang yang dialami adalah ketidak-mampuan untuk memberikan cukup banyak lapangan kerja bagi para kaum muda siap kerja. Salah satu dimensi masalah ketenaga-kerjaan berhubungan dengan rendahnya mutu tenaga kerja yang siap pakai. Karena itu, masalah pengangguran kaum muda harus dihadapi dengan membuat kebijakan komprehensif dalam mewujudkan peluang dan dunia usaha bagi generasi muda.

2. Minimnya Fasilitas Kewirausahaan Pemuda

Dalam rangka mendukung peluang dan dunia kerja bagi generasi muda sudah selayaknya lah di dukung oleh fasilitas/sarana dan prasarana yang representative. Sehingga dapat memacu dan memicu semangat kaum muda untuk terjun langsung dalam berwirausaha.

Fasilitas ini bisa dalam bentuk penyediaan tempat berwirausaha ataupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya pelatihan atau workshop terkait dunia usaha bagi kaum muda, akan dapat menumbuhkan semangat, inovasi, kreatifitas dan jiwa wirausaha (entrepreneurship) dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan *life skill* (ketrampilan kecakapan hidup) bagi para wirausaha muda maupun pemula.

3. Minimnya Koordinasi Antar Pemangku Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan peluang dan kesempatan kerja/berwirausaha bagi kaum muda dibutuhkan koordinasi yang solid antar masing-masing stakeholder terkait.

Dengan terbangunnya komunikasi yang baik lintas sektor diharapkan dapat menciptakan peluang usaha yang berkesinambungan bagi kaum pemuda. Di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan SDM pelaku usaha, sehingga memberikan kepastian dan harapan bagi kaum muda bahwa peluang dan kesempatan kerja itu dapat dilakukan oleh siapapun.

B. Isu Strategis Keolahragaan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pada Pasal 1 berbunyi: *“Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya”*.

Pembangunan olahraga merupakan penciptaan peluang yang menciptakan proses, sistem, dan struktur yang efektif yang memungkinkan dan mendorong semua orang, tanpa kecuali, termasuk kelompok dan area tertentu untuk mengambil bagian dalam olahraga.

Perkembangan sektor olahraga dalam sebuah provinsi dapat diukur melalui angka besaran indeks pembangunan keolahragaan pada provinsi tersebut. Istilah indeks ini dikenal sebagai Sport Development Index (SDI) atau Indeks pembangunan Olahraga (IPO). Istilah pembangunan olahraga yang digunakan dalam SDI menggambarkan proses, kebijakan, praktek yang membentuk sebuah kerangka kerja yang terpadu untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk berolahraga untuk meningkatkan kinerja mereka ke tingkat apapun yang mereka inginkan. Pembangunan olahraga juga tentang memastikan jalur dan struktur yang tersedia untuk memungkinkan orang mempelajari keterampilan Gerakan dasar, berpartisipasi dalam olahraga pilihan mereka, mengembangkan ketrampilan mereka, kompetensi dan kinerja, dan mencapai tingkat keunggulan.

Secara umum SDI mencakup Sembilan Dimensi yaitu: 1. Sumber Daya Manusia, 2. Ruang Terbuka, 3. Partisipasi, 4. Kebugaran, 5. Literasi Fisik, 6. Perkembangan Personal, 7. Kesehatan, 8. Ekonomi, 9. Dana Performa. Penjelasan dari setiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SDM Olahraga merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Indikator SDM Olahraga di suatu wilayah adalah rasio

- jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.
2. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik indoor maupun outdoor. Ruang terbuka merupakan tempat yang menjadi kebutuhan dasar bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga. Ruang terbuka yang memadai menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Indikator ruang terbuka di suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.
 3. Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat. Indikator utama dari literasi fisik adalah pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu. Individu yang memiliki literasi fisik yang bagus akan melibatkan diri dalam aktivitas fisik secara lebih intens dan berkelanjutan.
 4. Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu.
 5. Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan V_{O2max} , yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi V_{O2max} , menunjukkan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang.
 6. Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sementara itu, sehat secara psikis mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas.
 7. Perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Ada dua aspek yang diukur dalam perkembangan

personal, yakni resilien dan modal sosial. Resilien adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan (Connor & Davidson, 2003; Luthans, Luthans, & Luthans, 2004). Sementara itu, modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain (Degenne, 2004; Forrest & Kearns, 2001).

8. Ekonomi adalah pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan dan perlengkapan olahraga. Peralatan olahraga dapat berupa raket, stick atau pemukul, glove, dan bola. Sedangkan perlengkapan olahraga dapat berupa pakaian olahraga dan sepatu. Sementara itu, jasa olahraga bisa berupa pembayaran tiket, konsultan, dan/atau jasa pelatihan. Kemampuan membayar terhadap barang atau jasa merupakan indikator penting dari ekonomi seseorang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
9. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Performa dalam konteks ini diukur dengan dua hal, yakni perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di suatu daerah.

Menyimak keseluruhan dimensi SDI yang sebagaimana di atas, terlihat bahwa pendekatan pengukuran lebih bersifat *output-outcomes based assessment* (Crespo et al., 2010; Tam, 2014). Mengacu pada pendekatan tersebut, semua aktivitas dan sumber daya olahraga harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari pembangunan olahraga itu sendiri. Dari sembilan dimensi tersebut, hanya dua dimensi yang bersifat input, yakni SDM olahraga dan ruang terbuka, selebihnya merupakan dimensi yang bersifat output dan outcome.

Sementara itu tujuan pembangunan Keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang “Keolahragaan”, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa: Keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dan menjaga perdamaian dunia.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka olahraga adalah merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Baik itu pembudayaan olahraga maupun olahraga prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Oleh karena itu budaya olahraga penting bagi setiap individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga secara massal di tengah masyarakat.

Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas, olahraga akan menjadi gaya hidup sehat dan menjadi motor bagi pembangunan sumberdaya manusia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada point ke 4 yang berbunyi: *“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”*.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul tergambarkan dari capaian prestasi dan medali yang diperoleh dari setiap event yang di ikuti. Kemajuan olahraga prestasi tentu di dukung oleh system pembinaan dan support anggaran yang memadai. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada prinsipnya telah berbuat semaksimal mungkin dalam memajukan dunia olahraga di Provinsi Jambi, baik itu pembinaan Olahraga Pelajar melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) sebagai wadah pembinaan dan pelatihan atlet pelajar berbakat untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional. Maupun cabang olahraga yang langsung di bawah naungan pembinaan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi.

Salah satu tolak ukur dari prestasi olahraga sebuah daerah dapat dilihat dari pencapaian dalam event olahraga tingkat nasional atau dalam hal ini event Pekan Olahraga Nasional (PON). Raihan prestasi Provinsi Jambi dalam event olahraga (PON) yang di ikuti dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami pasang surut Prestasi. Capaian terbaik prestasi olahraga Provinsi Jambi di raih pada event Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVI Sumsel Tahun 2004 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perolehan Medali PON XVI 2004 Palembang 02 s.d 14 September 2004

<i>Peringkat</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Jumlah Medali</i>			<i>Total</i>
		<i>Emas</i>	<i>Perak</i>	<i>Perunggu</i>	
1	DKI Jakarta	141	111	114	366
2	Jawa Timur	77	81	111	269
3	Jawa Barat	76	79	94	249
4	Jawa Tengah	56	59	64	179
5	Sumatera Selatan	30	41	40	111
6	Jambi	27	28	15	70
7	Papua	23	13	19	55
8	Lampung	22	21	21	64
9	Kalimantan Timur	19	28	33	80
10	Sulawesi Selatan	17	22	19	58
11	Riau	16	14	20	50
12	Sumatera Utara	15	15	26	56
13	Sulawesi Utara	14	14	13	41
14	Bali	11	12	18	41
15	D.I Yogyakarta	10	13	21	44
16	Kalimantan Selatan	10	12	10	32
17	Sulawesi Tenggara	9	6	9	24
18	Kalimantan Barat	8	8	14	30
19	Nusa Tenggara Timur	8	4	4	16
20	Banten	7	9	31	47
21	Sumatera Barat	6	10	25	41
22	Aceh	6	2	5	13
23	Nusa Tenggara Barat	5	5	11	21
24	Kalimantan Tengah	5	3	15	23
25	Maluku	3	2	5	10
26	Bangka Belitung	2	4	6	12
27	Sulawesi Tengah	1	5	4	10
28	Bengkulu	1	4	6	11
29	Maluku Utara	0	0	4	4
30	Gorontalo	0	0	3	3
	<i>Jumlah</i>	<i>625</i>	<i>625</i>	<i>780</i>	<i>2030</i>

Sumber : Wikipedia

Dalam sejarah keikutsertaan Provinsi Jambi pada ajang Pekan Olahraga Nasional, dapat disimpulkan bahwa pada PON XVI 2004 Sumatera Selatan ini adalah prestasi terbaik yang di raih. Hal ini menggambarkan terjalannya pola pembinaan yang dilakukan baik itu oleh KONI sendiri selaku Induk Pembinaan Cabang Olahraga maupun support dari Pemerintah Daerah.

Pola pembinaan yang berkesinambungan dan sinergitas antar semua lini menjadi sangat penting sekali dalam meraih prestasi dalam dunia olahraga. Karena pembinaan yang terus berlangsung sepanjang waktu akan memberikan ruang dan waktu bagi setiap atlet dalam menjaga performanya di setiap event yang di ikuti. Hal

tersebut tergambar dalam prestasi yang dicapai Provinsi Jambi dalam event PON selanjutnya, dimana prestasi yang di raih mengalami pasang surut.

Pada PON XVII 2008 Kaltim Provinsi Jambi mengalami penurunan raihan medali yaitu hanya memperoleh 11 Emas, 17 Perak dan 28 Perunggu dan finish di urutan 15 Klasemen. Selanjutnya pada PON XVIII 2012 Riau, Kontingen Provinsi Jambi hanya meraih 3 Emas, 8 Perak dan 20 Perunggu dan finish pada peringkat 24 klasemen PON. Begitu pula pada perhelatan PON XIX 2016 Jawa Barat, Kontingen Provinsi Jambi hanya mampu finish di peringkat 23 dengan raihan 6 Emas, 6 Perak dan 21 Perunggu. Selanjutnya pada perhelatan PON XX 2021 Papua, Kontingen Provinsi Jambi mampu finish di peringkat 18 dengan raihan 6 Emas, 10 Perak dan 13 Perunggu. Pada event PON Aceh Medan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perolehan Medali PON XXI 2024 Aceh-Sumut 09 s.d 20 September 2024

<i>Peringkat</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Jumlah Medali</i>			<i>Total</i>
		<i>Emas</i>	<i>Perak</i>	<i>Perunggu</i>	
1	Jawa Barat	195	163	182	540
2	DKI Jakarta	184	150	145	479
3	Jawa Timur	146	136	143	425
4	Sumatera Utara	79	59	116	254
5	Jawa Tengah	71	74	115	260
6	Aceh	65	48	79	192
7	Bali	36	38	60	134
8	Kalimantan Timur	29	55	69	153
9	Yogyakarta	29	36	52	117
10	Lampung	22	16	30	68
11	Banten	21	24	33	78
12	Riau	21	22	37	80
13	Papua	19	26	23	68
14	Nusa Tenggara Barat	16	17	21	54
15	Kalimantan Selatan	15	15	26	56
16	Sulawesi Selatan	10	19	32	61
17	Sulawesi Utara	10	14	18	42
18	Sulawesi Tengah	8	7	20	35
19	Nusa Tenggara Timur	7	13	16	36
20	Jambi	6	18	27	51
21	Sumatera Selatan	6	15	30	51
22	Papua Barat	6	7	16	29
23	Papua Pegunungan	6	0	3	9
24	Sumatera Barat	5	14	30	49
25	Kepulauan Riau	5	6	8	19
26	Kalimantan Barat	4	7	19	30
27	Papua Tengah	4	5	7	16
28	Gorontalo	3	4	6	13
29	Bangka Belitung	3	2	6	11
30	Kalimantan Utara	3	1	5	9
31	Maluku	2	3	8	13

32	Papua Barat Daya	2	0	4	6
33	Kalimantan Tengah	1	9	3	13
34	Sulawesi Tenggara	1	5	8	14
35	Papua Selatan	0	2	2	4
36	Sulawesi Barat	0	2	0	2
37	Bengkulu	0	0	7	7
38	Maluku Utara	0	0	2	2
39	Ibu Kota Nusantara	0	0	0	0
	Jumlah	1040	1032	1408	3480

Catatan : IKN hanya sebagai undangan kehormatan

Sumber : Wikipedia

Di lihat dari tabel di atas, capaian Provinsi Jambi mengalami penurunan prestasi dari PON Papua 2021. Dimana pada perhelatan PON XX 2021 Papua, Kontingen Provinsi Jambi mampu finish di peringkat 18 dengan raihan 6 Emas, 10 Perak dan 13 Perunggu.

Salah satu hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah karena belum optimalnya sistem pembinaan olahraga prestasi yang hingga saat ini masih kurang dikembangkan serta belum dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi juga melakukan pembinaan prestasi Olahraga Pelajar. Hal ini dapat dilihat pada raihan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS).

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (disingkat POPNAS) adalah merupakan ajang multi-olahraga pelajar yang tertinggi dan bergensi tingkat nasional di Indonesia. Popnas diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi). Popnas dilaksanakan pertama kali sejak tahun 1989 di DKI Jakarta, dan kemudian secara rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil, dengan diikuti oleh ribuan atlet pelajar seluruh provinsi di Indonesia yang berkompetisi dalam berbagai pertandingan olahraga. Popnas diharapkan dapat menjadi momentum dalam memacu gairah pelajar Indonesia agar berprestasi di bidang olahraga dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia kelak di ajang ASEAN School Games (ASG). Oleh karena itu, pembinaan olahraga di tingkat pelajar mempunyai peranan penting dan strategis sebagai upaya untuk menjaring calon-calon atlet berbakat yang memiliki potensi dikembangkan menjadi atlet yang berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Tolak ukur dari prestasi olahraga pelajar sebuah daerah dapat dilihat dari pencapaian dalam event olahraga tingkat nasional atau dalam hal ini event Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS). Raihan prestasi Provinsi Jambi dalam event

olahraga (POPNAS) yang di ikuti dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami pasang surut Prestasi. Capaian terbaik prestasi olahraga pelajar Provinsi Jambi pada ajang ini di tiga kali pelaksanaan terakhir di raih pada event Pekan Olahraga Pelajar Nasioanal (POPNAS) ke XV DKI Jakarta Tahun 2019, dengan raihan medali 7 Emas, 5 Perak dan 4 Perunggu dan finish pada urutan 10 klasemen.

Pada POPNAS XIV 2017 di Semarang Jawa Tengah, Provinsi Jambi hanya memperoleh medali 11 Emas, 17 Perak dan 28 Perunggu dan finish di urutan 15 Klasemen. Selanjutnya pada POPNAS XV 2019 Jakarta, Kontingen Provinsi Jambi meraih 7 Emas, 5 Perak dan 4 Perunggu dan finish pada peringkat 10 besar klasemen POPNAS. Adapun pada perhelatan POPNAS XVI 2023 Palembang, Sumsel, Kontingen Provinsi Jambi hanya mampu finish di peringkat 15 dengan raihan 3 Emas, 13 Perak dan 9 Perunggu. Raihan terbaik dicapai pada pelaksanaan POPNAS XV 2019 Jakarta, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perolehan Medali POPNAS XV 2019 Jakarta 16 s.d 24 November 2019

<i>Peringkat</i>	<i>Provinsi</i>	<i>Jumlah Medali</i>			<i>Total</i>
		<i>Emas</i>	<i>Perak</i>	<i>Perunggu</i>	
1	Jawa Barat	37	34	28	99
2	DKI Jakarta	36	30	27	93
3	Jawa Timur	29	30	41	100
4	Jawa Tengah	18	26	37	81
5	Bali	18	16	27	61
6	Banten	9	7	15	31
7	DI Yogyakarta	8	4	5	17
8	Sumatera Barat	7	8	16	31
9	Kalimantan Timur	7	8	14	29
10	Jambi	7	5	4	16
11	Sumatera Utara	7	4	12	23
12	Lampung	5	5	6	16
13	Kalimantan Selatan	4	4	6	14
14	Nusa Tenggara Timur	4	3	2	9
15	Riau	3	8	8	19
16	Kep. Bangka Belitung	3	6	2	11
17	Sulawesi Selatan	3	3	9	15
18	Sulawesi Tengah	3	1	7	11
19	Sulawesi Utara	3	0	4	7

20	Gorontalo	2	3	3	8
21	Kepulauan Riau	2	1	3	6
22	Kalimantan Tengah	2	0	0	2
23	Nusa Tenggara Barat	1	4	5	10
24	Sumatera Selatan	1	3	8	12
25	Papua	1	2	11	14
26	Maluku	1	0	1	2
27	Kalimantan Barat	0	3	3	6
28	Sulawesi Tenggara	0	2	5	7
29	Bengkulu	0	1	2	3
30	Aceh	0	0	1	1
31	Maluku Utara	0	0	1	1
32	Papua Barat	0	0	1	1
33	Kalimantan Utara	0	0	0	0
34	Sulawesi Barat	0	0	0	0
	Jumlah	221	221	314	756

Sumber : Wikipedia

Pembinaan olahraga pelajar haruslah dilakukan dengan serius dan dikolaborasikan dengan semua lini yang ada. Dengan pembinaan yang suistainble (berkelanjutan) diharapkan prestasi akan dapat diraih lebih baik lagi.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga juga terus melakukan pembinaan olahraga bagi kalangan Disabilitas yang ada. Karena pemerintah memberikan ruang yang seluas luasnya bagi kemajuan olahraga, baik itu untuk yang normal maupun bagi penyandang disabilitas.

Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat 1 dikatakan: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya pada ayat 2; Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dengan demikian kesetaraan antara penyandang Disabilitas dan non Disabilitas menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Begitu pula dalam bidang olahraga. Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 15 yaitu: Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. melakukan kegiatan keolahragaan; b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan; c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses; e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga; f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan; g. menjadi pelaku keolahragaan; h. mengembangkan industri keolahragaan; dan i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Dalam pembangunan olahraga khususnya bagi pelajar penyandang disabilitas di Provinsi Jambi telah dilaksanakan secara maksimal. Support pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi terus dilakukan, yang ditandai dengan terus mendukung event-event olahraga pelajar bagi penyandang disabilitas agar dapat meraih prestasi nya. Salah satunya melalui event Olahraga Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS).

Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional atau Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Perbedaan POPNAS dan PEPARPENAS terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, dimana atlet dikelompokkan berdasarkan kondisi fisiknya. Dulunya, PEPARPENAS disebut Pekan Olahraga Penyandang Cacat Nasional (POPCANAS), namun kemudian kata 'cacat' diganti dengan kata 'paralimpiade' seiring perkembangan yang terjadi di dalam organisasi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia, yang sekarang bermetamorfosis menjadi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).

Capaian prestasi olahraga pelajar disabilitas Provinsi Jambi pada ajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perolehan Medali Provinsi Jambi pada PEPARPENAS

NO	KEGIATAN	TEMPAT/TAHUN	MEDALI			JUMLAH MEDALI	PERINGKAT
			EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	POPCANAS (I)	DKI. JAKARTA, 14-18 Oktober 2003	2	4	1	7	15
2.	POPCANAS (II)	SURAKARTA, 24-29 September 2005	4	4	6	14	6
3.	POPCANAS (III)	JABAR, 01-06 November 2007	2	4	1	7	15
4.	POPCANAS (IV)	JOGYAKARTA, 19-25 November 2009	4	4	6	14	6
5.	POPCANAS (V)	RIAU, 16-22 Oktober 2011	2	4	6	12	4
6.	PEPARPENAS (VI)	DKI. JAKARTA, 07-13 Oktober 2013	3	5	6	14	14
7.	PEPARPENAS (VII)	JABAR, 09-15 Juni 2015	4	5	7	16	8
8.	PEPARPENAS (VIII)	SURAKARTA, 07-14 November 2017	8	5	4	17	8
9.	PEPARPENAS (IX)	DKI JAKARTA, 06-13 November 2019	3	3	8	14	13
10.	PEPARPENAS (X)	SUMSEL 29 Juli-04 Agustus 2023	0	3	1	4	20
11.	PEPARPENAS (XI)	DKI. JAKARTA Nov-25	-	-	-	-	-

Sumber : Dispora Provinsi Jambi

Dari gambaran yang disajikan di atas, dapat kita lihat capaian prestasi olahraga pelajar Disabilitas Provinsi Jambi pada event PEPARPENAS tersebut mengalami pasang surut. Hal ini antara lain dikarenakan masih minimnya ketersediaan atlet pelajar disabilitas yang ada.

Hal tersebut menjadi catatan bagi kita semua bagaimana memacu dan menarik minat kaum disabilitas untuk menekuni olahraga, khususnya bagi pelajar, karena masih minimnya sosialisasi dan edukasi yang diterima. Pemerintah harus bisa menyakinkan bahwa para penyandang disabilitas diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam semua bidang kehidupan.

Melihat dari uraian dan capaian prestasi Olahraga baik itu Olahraga Prestasi maupun Olahraga Disabilitas Provinsi Jambi kurun waktu 5 tahun terakhir memang mengalami fluktuasi. Hal ini tentulah menjadi perhatian bagi kita semua, isu strategis serta permasalahan yang dihadapi membutuhkan perhatian serta penanganan khusus

dari Pemerintah Daerah. Beberapa isu strategis dan permasalahan keolahragaan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga di antaranya:

1. Prasarana dan Sarana Olahraga Masih Terbatas dan Belum Memenuhi Standar.

Fokus pembangunan keolahragaan adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan penguatan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah.

Ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai secara kuantitas dan kualitas memegang peranan penting dalam peningkatan prestasi olahraga sebuah daerah. Di Provinsi Jambi sendiri, masih banyak terdapat fasilitas olahraga yang belum memenuhi standar baik secara jumlah ketersediaannya dan juga secara kualitas atau standarnya yang bisa dikatakan belum memenuhi. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kondisi bangunan prasarana olahraga milik Pemerintah Provinsi Jambi yang kondisinya sudah lama dan perlu dilakukan revitalisasi kembali. Capaian prestasi olahraga berbanding lurus dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Sistem Pembinaan Olahraga Prestasi Belum dikembangkan dan dilakukan Secara Sistematis, Terencana, Berjenjang dan Berkelanjutan.

Salah satu tolak ukur dari prestasi olahraga sebuah daerah dapat dilihat dari pencapaian dalam event olahraga tingkat nasional, baik itu pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) maupun Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS).

Raihan Prestasi Provinsi Jambi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir memang mengalami pasang surut. Hal ini tentunya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam prosesnya. Dari pola pembinaan yang belum sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Pembinaan masih dilakukan secara terpisah oleh organisasi masing-masing tanpa adanya sistem yang menyeluruh dan berfokus pada pembinaan atlet dari mulai usia dini hingga ke jenjang elit. Belum adanya dasar hukum yang mengatur dan memperkuat sistem pembinaan olahraga yang

berjenjang juga menjadikan pembinaan atlet di Provinsi Jambi masih belum optimal.

Manajemen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pembinaan olahraga karena merupakan unsur utama dalam pengelolaan organisasi baik itu pengurus provinsi maupun klub-klub olahraga dalam perjalanannya mengikuti kompetisi. Tentu untuk mencapai prestasi yang maksimal manajemen pun perlu dikelola dengan baik. Karena, manajemenlah motor utama dalam mengatur dan mengelola agar tercapai apa yang menjadi tujuan dan tindakan yang akan dijalankan sudah sesuai dengan rencana yang telah ada.

Dalam pengembangan olahraga prestasi diperlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari atlet, pelatih, organisasi olahraga, Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lainnya. Organisasi Olahraga memegang posisi strategis dalam mengembangkan prestasi olahraga melalui program kerja yang disusun dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dikarenakan program kerja yang disusun akan mempengaruhi prestasi yang dicapai oleh atlet dan pelatih. Untuk meraih prestasi tertinggi tidak hanya atlet dan pelatih saja yang berperan, akan tetapi peran Pengurus Cabang Olahraga karena dalam meraih prestasi tidak begitu saja diperoleh, tetapi dengan rencana yang tersusun, terarah dan berkesinambungan, gizi yang baik, sarana dan prasarana latihan yang memadai didukung IPTEK Olahraga yang mumpuni, semua itu dipersiapkan oleh Pengurus cabang Olahraga dalam suatu rangkaian yaitu Program Kerja Cabang Olahraga. Dari pemikiran tersebut maka diperlukan pembinaan atau penataan organisasi olahraga khususnya cabang olahraga prestasi.

3. Manajemen Kompetisi Belum Berjenjang, Rutin dan Berkelanjutan.

Keikutsertaan atlet pada sebuah kompetisi merupakan salah satu indikator pengukuran kemampuan atlet dan dapat dipakai juga sebagai indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh sebuah daerah. Belum banyak kompetisi olahraga yang berjenjang sejak usia dini dan dilakukan secara rutin untuk menjaring atlet-atlet berpotensi.

Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan dan mengatur secara terencana, sistematis, dan mengelola secara profesional setiap bentuk

penyelenggaraan keolahragaan. Sinergitas dengan organisasi keolahragaan juga diperlukan untuk lebih bisa mengoptimalkan dan mensinkronkan perencanaan program serta anggaran yang dibutuhkan dalam pembinaan dan pemassalan olahraga. Dengan memperbanyak kompetisi olahraga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kemajuan prestasi atlet itu sendiri.

Prestasi olahraga dapat dicapai apabila pemassalan, pembibitan, pemanduan, kompetisi dan pengembangan bakat dapat dilakukan dengan baik. Sistem pembinaan tersebut merupakan sebuah tuntutan tata kelola untuk mengupayakan keunggulan potensial menuju keunggulan yang berdaya saing tinggi. Olahraga tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan yang mendukung bagi peningkatan prestasi olahraga.

Tabel 14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Atlet-atlet muda yang dapat dibina untuk keberlangsungan prestasi olahraga daerah; Adanya komunitas di bidang ekonomi kreatif dan kewirausahaan; Penyediaan pelatihan kewirausahaan untuk Pemuda	Terbatasnya infrastruktur keolahragaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan;	Tantangan ekonomi yang dihadapi pemuda seperti pengangguran; Kebutuhan untuk mendorong pemuda menciptakan lapangan kerja baru; Pemanfaatan fasilitas olahraga yang belum optimal, baik oleh pemuda maupun masyarakat umum;	Cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim memengaruhi berbagai jenis olahraga;	Telah adanya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON); Telah adanya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Belum meratanya pembinaan dan infrastruktur pemuda dan olahraga di tiap daerah	Belum optimalnya kualitas infrastruktur olahraga; Belum adanya peraturan mengenai keolahragaan di daerah; Bonus demografi yang tidak berbanding lurus dengan jumlah lapangan kerja; Belum optimalnya fasilitasi kewirausahaan bagi pemuda;	Prasarana dan Sarana Olahraga Masih Terbatas dan Belum Memenuhi Standar; Sistem Pembinaan Olahraga Prestasi Belum dikembangkan dan dilakukan Secara Sistematis, Terencana, Berjenjang dan Berkelanjutan; Manajemen Kompetisi Belum Berjenjang, Rutin dan Berkelanjutan; Kewirausahaan dan Peluang Kerja Pemuda; Minimnya Fasilitas Kewirausahaan Pemuda; Minimnya Koordinasi Antar Pemangku Kebijakan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi, sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2025-2029 ialah **Terwujudnya kualitas pemuda dan olahraga yang berdaya saing.**

Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, Indikator Sasaran pada RENSTRA menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2025-2029. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Jambi tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindak pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan prestasi olahraga serta tertib administrasi.

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi adalah Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga.

Terkait hal tersebut maka gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya kualitas pemuda dan olahraga yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	NA	60	62	63	65	66
		Indeks Pembangunan Olahraga	0,436	0,503	0,535	0,567	0,599	0,631
	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Persentase peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan kepemudaan	0,016	0,027	0,033	0,037	0,041	0,045
		Persentase peningkatan perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar single event nasional	0,00	3,23	6,25	8,82	10,81	12,20
		Persentase peningkatan perolehan medali pada kejuaraan olahraga multi event nasional	31,15	0	9,37	7,50	11,43	0

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah upaya nyata yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan

merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menggunakan analisa SWOT yang merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada dilingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi dilingkungan Provinsi Jambi. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dan kondisi eksternal.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Dari alternatif strategi yang dapat dirumuskan akan dirangkum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan. Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal dengan melibatkan seluruh stakeholders Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Untuk memudahkan menentukan strategi yang akan dipilih maka dilakukan analisa data dan informasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Analisa data dimulai dari pencapaian Indikator Sasaran: Jumlah Pemuda Berkarakter dan Mandiri. Analisa indikator ini pada umumnya berkaitan dengan data keberadaan dan kompetensi SDM yang disesuaikan dengan potensi daerah yang menonjol, dimana keduanya merupakan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yang ada kemudian dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan kondisi awal para pemuda yang belum memiliki keberkarakteran, menjadi kelompok pemuda yang telah memiliki keberkarakteran untuk selanjutnya dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai, hingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Perumusan strategi tersebut tentunya diperlukan dukungan faktor internal yang dimiliki Dinas pemuda dan

Olahraga Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah yang memiliki amanat dengan tupoksi pada urusan Pemuda dan olahraga.

Tabel 16 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG :	TANTANGAN :
	Potensi keunggulan demografi dan jumlah pemuda di Jambi	1. Dampak global dan Persaingan di dunia kerja 2. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja
KEKUATAN : 1. Ketersediaan pelatihan dan narasumber berkompeten 2. SDM aparatur yang berkompeten	Alternatif Strategi : Peningkatan pembinaan karakter dan kemandirian Pemuda	Alternatif Strategi : 1. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing di dunia usaha 2. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda
KELEMAHAN : 1. Belum optimalnya kesinambungan antar program kegiatan 2. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran	Alternatif Strategi : Peningkatan peranan organisasi kepemudaan	Alternatif Strategi : 1. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri 2. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders

Dari uraian analisa SWOT diatas diperoleh beberapa alternatif strategi:

1. Peningkatan dan pengembangan karakter dan kemandirian Pemuda.
2. Peningkatan peranan organisasi kepemudaan.
3. Peningkatan kompetensi pemuda untuk bersaing didunia usaha.
4. Pengembangan Inovasi Kewirausahaan pemuda.
5. Pembentukan Lembaga Penjamin Modal secara Mandiri atau Kolaborasi.
6. Peningkatan pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Kab/Kota dan stakeholders.

Tabel 17 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar di Event Nasional

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG :	TANTANGAN :
	1. Potensi atlet pelajar pada sentra keolahragaan dan di sekolah se Provinsi Jambi 2. Olahraga sudah menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan	1. Persaingan Kejuaraan Single Event Nasional 2. Persaingan Kejuaraan Multi Event Nasional
KEKUATAN :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Dispora memiliki PPLP/SPOBDA 2. Dukungan Fasilitas APBN untuk beberapa Cabor	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi cabor di daerah	1. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP/SPOBDA 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan cabor daerah 3. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
KELEMAHAN :	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Belum dimilikinya Sekolah Khusus Olahraga 2. Kurangnya binaan terhadap cabor strategi 3. Belum optimalnya ketersediaan dan alokasi anggaran 4. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di daerah belum optimal	1. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif <i>stakeholders</i> 2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN) 3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	1. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event 2. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/internasional 3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga 4. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Dari uraian analisa SWOT diatas diperoleh beberapa alternatif strategi :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanduan dan seleksi bakat
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetisi cabor di daerah
3. Peningkatan dukungan fasilitas PPLP/SPOBDA
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan cabor daerah
5. Penyelenggaraan kejuaraan di daerah
6. Peningkatan pembinaan atlet pelajar secara berkelanjutan dan didukung dengan IPTEK melibatkan peran aktif stakeholders
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders perencanaan anggaran daerah, provinsi dan pusat (APBD/APBN)
8. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga

9. Peningkatan partisipasi atlet pada single/multi event
10. Pemberian penghargaan atlet berprestasi nasional/internasional
11. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pembinaan Prestasi Olahraga
12. Pemberian penghargaan atlet/masyarakat yang berperan pada olahraga

Berdasarkan beberapa hasil Analisa SWOT tersebut, maka Strategi yang dipilih merupakan pemilihan alternatif yang paling efektif, efisien, ekonomis dan aplikatif, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, maka Strategi yang paling tepat guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah:

1. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
2. Peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan
3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga

Pentahapan pembangunan sektor kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jambi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi di tuangkan pada tabel berikut:

Tabel 18 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan regulasi keolahragaan; Peningkatan pembinaan atlet pelajar untuk menghadapi POPNAS 2027	Fasilitasi partisipasi kontingen atlet pelajar dalam mengikuti POPNAS 2027	Optimalisasi sumber daya dalam mengikuti even nasional PON	Fasilitasi partisipasi kontingen atlet pelajar dalam mengikuti POPNAS 2029	Peningkatan kapasitas atlet dan SDM keolahragaan
Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam upaya peningkatan kualitas pemuda	Peningkatan potensi dan kapasitas pemuda dalam meraih prestasi di bidang kepemudaan	Peningkatan potensi dan kapasitas pemuda dalam meraih prestasi di bidang kepemudaan	Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah

3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahrgaan di Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 di tuangkan pada tabel berikut:

Tabel 19 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga	
2	PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;			
3	Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)			
4	UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan		Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara	
5	Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah			
6	Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan			

Dari analisis SWOT pada poin 3.2, dapat dirumuskan Arah Kebijakan yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam menerapkan strategi guna mencapai sasaran pembangunan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 20 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kualitas pemuda dan olahraga yang berdaya saing	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
		Peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan	Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga
		Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Adapun Program Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai rencana waktu pelaksanaan.

Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, secara lengkap rencana program, kegiatan, subkegiatan serta pendanaan indikatif dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan pemenuhan kinerja pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
 - 2) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
 - 3) Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi

- 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
 - 6) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
 - 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi
 - 8) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
 - 2) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

- 2) Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi
- 3) Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Seleksi Atlet Daerah
 - 2) Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
 - 3) Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
 - 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi
 - 5) Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
 - 2) Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
 - 2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi
 - 3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
 - 4) Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi
 - 5) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
 - 6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
 - 7) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi
 - 8) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari subkegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 21 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG SESUAI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya kualitas pemuda dan olahraga yang berdaya saing				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
					Indeks Pembangunan Olahraga		
		Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga			Persentase peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan kepemudaan		
					Persentase peningkatan perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar single event nasional		
					Persentase peningkatan perolehan medali pada kejuaraan olahraga multi event nasional		
					Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan			Rasio Pemberdayaan Pemuda		
			Meningkatnya Kesadaran, dan peran serta Pemuda		Persentase pemuda yang diberdayakan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	

				Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang Menerima Penghargaan Pemuda	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
				Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
				Meningkatnya peran serta Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	

				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase atlet pelajar yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga pelajar single event nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
					Persentase atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga multi event nasional		
					Persentase Peningkatan partisipasi pada seleksi pembinaan SPOBDA		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
				Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	
				Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	
				Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	

				Meningkatnya penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
				Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	
				Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi yang terlaksana	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
				Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Seleksi Atlet Daerah	
				Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	
				Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	
				Meningkatnya pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terlaksana	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	

				Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
				Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	
				Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	
				Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
				Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	

Tabel 22 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket				
			2026		2027		2028		2029		2030						
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
Pemuda dan Olahraga				65.953.522.373		67.710.882.700		73.378.414.680		89.086.785.738		75.280.990.800					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP	BB (70,25)	BB (73)	25.562.940.149	BB (74)	22.208.874.700	BB (75)	23.386.365.680	BB (76)	23.848.786.738	BB (77)	25.057.775.800					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,56	86,3				86,6				87			87		88	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	1	70,5				71,5				75			76		78	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	100	530.185.344	100	612.945.300	100	643.592.500	100	675.772.038	100	709.560.100					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	1	400.012.494	1	130.165.000	1	136.673.250	1	143.506.900	1	150.682.200					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1	12.240.000	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAS-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4	117.932.850	4	117.932.900	4	123.829.500	4	130.020.900	4	136.521.900					
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1	289.847.400	1	304.339.750	1	319.556.738	1	335.534.500					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tersusun	100	100	12.033.668.155	100	12.710.351.600	100	13.345.869.180	100	14.013.162.600	100	14.713.820.300					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	85	11.887.563.355	85	12.481.941.600	85	13.106.038.680	85	13.761.340.600	85	14.449.407.600					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	146.104.800	12	153.410.000	12	161.080.500	12	169.134.500	12	177.591.200					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	12	17.364.300					
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	2	15.000.000	2	15.750.000	2	16.537.500	2	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	4	15.000.000	4	15.750.000	4	16.537.500	4	17.364.300					

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang tersusun	100	100	50.000.000	100	65.000.000	100	68.250.000	100	71.662.500	100	75.245.500	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	52.500.000	4	55.125.000	4	57.881.200	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Pendapatan Daerah yang tersusun	-	100	-	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.537.500	100	17.364.300	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	-	100	251.994.500	100	285.960.000	100	309.806.000	100	335.799.100	100	364.142.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	1	173.600.000	1	190.960.000	1	210.056.000	1	231.061.600	1	254.167.700	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.300	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	10	78.394.500	5	40.000.000	5	42.000.000	5	44.100.000	5	46.305.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	JumlahPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	5	40.000.000	5	42.000.000	5	44.100.000	5	46.305.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	96	100	662.213.622	100	942.000.000	100	989.100.000	100	1.038.555.000	100	1.090.482.600	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	47.250.000	1	49.612.500	1	52.093.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	150.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	39.585.000	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	181.136.500	1	190.000.000	1	199.500.000	1	209.475.000	1	219.948.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.300	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	12	249.992.122	12	450.000.000	12	472.500.000	12	496.125.000	12	520.931.200	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	-	100	4.354.299.393	100	1.290.000.000	100	1.412.000.000	100	1.385.100.000	100	1.459.355.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	928.579.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1	734.947.000	-	-	1	450.000.000	-	-	1	450.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10	2.690.773.393	10	440.000.000	10	462.000.000	10	485.100.000	10	509.355.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	350.000.000	-	-	1	400.000.000	-	-	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100	100	4.245.350.200	100	4.457.617.800	100	4.680.498.000	100	4.680.498.000	100	4.914.521.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	1.973.441.400	12	2.072.113.500	12	2.175.719.000	12	2.175.719.000	12	2.284.504.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.271.908.800	12	2.385.504.300	12	2.504.779.000	12	2.504.779.000	12	2.630.017.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	96	100	3.435.228.935	100	1.830.000.000	100	1.921.500.000	100	1.631.700.000	100	1.713.285.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31	59	800.000.000	59	800.000.000	59	840.000.000	59	882.000.000	59	926.100.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	109	130.000.000	109	130.000.000	109	136.500.000	109	143.325.000	109	150.491.250	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	14	1	2.505.228.935	1	550.000.000	1	577.500.000	1	606.375.000	1	636.693.750	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1	350.000.000	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1	367.500.000	-	-	-	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	0,064	0,081	2.045.695.575	0,088	3.001.998.000	0,095	3.190.084.000	0,104	3.391.374.000	0,114	3.606.908.000	
	Rasio Pemberdayaan Pemuda	0,008	0,012		0,013		0,014		0,015		0,016		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase pemuda yang diberdayakan		14,10	1.370.695.575	18,03	2.293.248.000	20,33	2.445.897.000	22,62	2.609.979.000	24,92	2.786.444.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	80	80	690.685.390	90	759.754.000	100	835.729.000	110	919.302.000	120	1.011.232.000	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang Menerima Penghargaan Pemuda	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2	-	-	2	300.000.000	2	315.000.000	2	330.750.000	2	347.288.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-	80	325.000.000	85	341.250.000	90	358.312.000	95	376.228.000	100	395.040.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	4	5	265.676.375	5	292.244.000	5	306.856.000	5	322.199.000	5	338.309.000	
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	-	-		30	300.000.000	35	315.000.000	40	330.750.000	45	347.287.500	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40	50	89.333.810	60	300.000.000	70	315.000.000	80	330.750.000	90	347.287.500	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diberdayakan	100	100	675.000.000	100	708.750.000	100	744.187.000	100	781.395.000	100	820.464.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	100	100	325.000.000	100	341.250.000	100	358.312.000	100	376.227.000	100	395.038.000	
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	-	10	350.000.000	10	367.500.000	10	385.875.000	10	405.168.000	10	425.426.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga pelajar single event nasional	52,38	53,33	34.390.582.224	54,17	37.650.010.000	54,90	41.709.465.000	55,56	56.499.500.000	56,36	41.001.828.000	
	Persentase atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan olahraga multi event nasional	42,02	-		23,72		45,21		25,33		-		
	Persentase Peningkatan partisipasi pada seleksi pembinaan SPOBDA	15,38	5,00		7,14		8,89		10,20		11,10		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan	100	100	4.657.641.752	100	3.313.776.000	100	3.479.465.000	100	3.051.250.000	100	3.203.812.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	-	-	-	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	12	12	4.657.641.752,00	19	2.813.776.000	19	2.954.465.000	19	2.500.000.000	19	2.625.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang terlaksana	63,6	100	24.532.940.472	100	27.386.234.000	100	30.642.500.000	100	28.285.875.000	100	29.434.049.000	
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	131	110	5.032.940.472	330	5.536.234.000	120	5.700.000.000	345	6.000.000.000	150	6.408.881.000	
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1	1	3.500.000.000	1	4.200.000.000	1	4.400.000.000	1	4.600.000.000	1	4.820.000.000	
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5	5	16.000.000.000	4	17.650.000.000	5	20.542.500.000	4	17.685.875.000	5	18.205.168.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi yang terlaksana	84	100	5.200.000.000	100	6.450.000.000	100	7.062.500.000	100	24.611.125.000	100	7.785.155.000	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-	-	-	40	200.000.000	-	-	50	220.500.000	-	-	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	-	-	-	85	500.000.000	165	17.500.000.000	91	550.000.000	
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	12	-	-	3	500.000.000	1	525.000.000	3	551.250.000	1	578.812.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	52	5.000.000.000	65	5.500.000.000	70	5.775.000.000	75	6.063.750.000	80	6.366.937.000	
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang terlaksana	-	-	-	100	500.000.000	100	525.000.000	100	551.250.000	100	578.812.000	
Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-	-	-	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.000	
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	-	-	-	1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000	1	289.406.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	1,59	1,72	3.954.304.425	1,78	4.850.000.000	1,85	5.092.500.000	1,92	5.347.125.000	1,99	5.614.479.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	1	100	3.954.304.425	100	4.850.000.000	100	5.092.500.000	100	5.347.125.000	100	5.614.479.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	-	-	-	1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	5	250.000.000	5	262.500.000	5	275.625.000	5	289.406.000	
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	40	250.000.000	50	262.500.000	60	275.625.000	70	289.406.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator outcome / output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ke
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1	1	3.954.304.425	1	3.500.000.000	1	3.675.000.000	1	3.858.750.000	1	4.051.687.000	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	-	-	-	1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	-	-	8	250.000.000	8	262.500.000	8	275.625.000	8	289.406.000	

Tabel 23 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
			Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
			Seleksi Atlet Daerah	
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
			Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	
			Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59	60	62	63	65	66	
2	Indeks Pembangunan Olahraga	indeks	0,471	0,503	0,535	0,567	0,599	0,631	

Tabel 25 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>									
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosialisasi Kemasyarakatan	%	0,598	0,728	0,736	0,743	0,750	0,758	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	0,019	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	
3	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	
4	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	kegiatan	11	11	11	11	11	11	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi merupakan sebuah pedoman perencanaan program maupun kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Provinsi Jambi dalam kurun waktu selama lima tahun. Rencana Strategis ini berisi tentang bagaimana mimpi untuk menjadikan pemuda dan olahraga di Provinsi Jambi ini menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Melalui keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dari setiap Dinas yang membidangi urusan pemuda dan olahraga baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun stakeholder terkait. Harapan kami, semoga dengan adanya Rencana Strategis ini bermanfaat bagi perkembangan bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Jambi.